



BPK Temukan Bansos Fiktif

JAKARTA, TRIBUN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah penyimpangan pengelolaan dana bantuan sosial (Bansos) oleh Pemprov Sumut pada anggaran 2011-2012.

Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat BPK Kantor Perwakilan Sumut, Iskandar Setiawan, menyatakan hasil audit menunjukkan beberapa kegiatan yang dibayai dana Bansos tidak sesuai proposal.

Bahkan beberapa lainnya ditengarai fiktif lantaran tak

semua penggunaan hibah berstatus tuntas.

"Terdapat penerima dana hibah dan bansos yang belum menyampaikan pertanggungjawaban," kata Iskandar, Jumat (24/7) lalu.

Penyimpangan dalam anggaran Bansos Sumut disinyalir melatarbelakangi kasus suap terhadap Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Kasus yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi

■ Bersambung ke Hal. 7



BPK Temukan Bansos Fiktif

(KPK) tersebut menyeret pengacara kondang, OC Kaligis sebagai tersangka.

Kaligis adalah kuasa hukum Ahmad Fuad Lubis, Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut, yang mengugat pemanggilan pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Sumut dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos.

Dua hari sebelum kasus suap terungkap, Kamis tiga pekan lalu, majelis hakim PTUN Medan mengabulkan sebagian gugatan Ahmad Fuad. Nah, kini kasus suap itu juga disinyalir melibatkan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, yang juga atasan Ahmad Fuad.

Gubernur Gatot dan istri-nya, Evi Susanti, menjalani pemeriksaan di KPK, Senin (27/7). Merujuk pada audit BPK pada 2012, sebanyak 1.631 proposal dana Bansos tak melalui pembahasan biro terkait.

Besaran dan pengalokasiannya disinyalir juga banyak ditentukan Gubernur Gatot, yang sebelumnya Wakil Gubernur Sumut berpasangan dengan Gubernur Syamsul Arifin sejak 2008.

Gatot naik menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur sejak 2011 lantaran Syamsul menjadi tersangka kasus korupsi anggaran di Kabupaten Langkat.

Dua tahun lalu, Gatot menang lagi dalam Pilgub Sumut. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan, Hamdani Harahap, mengatakan selama pemerintahan Gatot, dana hibah melonjak signifikan.

Pada 2010, misalnya, dannya hanya Rp 361 miliar. Namun pada 2011 menjadi Rp 459 miliar, kemudian menjadi Rp 2 triliun pada anggaran tahun berikutnya.

Hamdani mencontohkan salah satu penyimpanan yang juga ditemukan oleh BPK.

Sebagian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 17 miliar, menurut dia, dialihkan ke pos anggaran dana Bansos dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) di 33 kabupaten dan kota. "Padahal, dana BOS itu dari anggaran negara. Ini tidak sesuai peruntukan," tegas Hamdani.

Kepala Subdirektorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Sarjono Turin, mengatakan penyidik masih menelusuri dugaan korupsi dana Bansos tersebut. Ia membenarkan bahwa dua persoalan utama dalam penyelidikan Kejaksaan ialah penggunaan dana BOS dan BDB. "Penyelidikan sejak Mei 2015 atas laporan masyarakat," tutur Turin.

Pada Mei 2013, Polda Sumut, telah menetapkan Kepala Bidang Perbendaharaan Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Ilyas Hasibuan, sebagai tersangka dalam kasus ini. Sebanyak 34 saksi diperiksa.

Ilyas juga ditahan 2 bulan saat penyidikan. Namun berkas perkara mondar-mandir antara kepolisian dan kejaksaan karena dianggap tak lengkap. Pada November 2014, Polda menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasus ini.

Dalam kasus ini, sejumlah pejabat telah divonis penjara. Mereka antara lain, mantan Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Pemprov Sumut, Shakira Zandi, telah divonis 18 bulan penjara dan denda Rp 50 juta.

Ada juga mantan Bendahara Biro Bina Kemasyarakatan

Sambungan Hal. 1

katan dan Sosial Pemprov Sumut, Ahmad Faisal, yang dihukum 18 bulan bui dan denda Rp 50 juta. Pejabat lainnya, adalah mantan mantan Bendahara Belanja Bantuan Hibah dan Sosial Biro Perekonominian Sekretariat Daerah Pemprov Sumut, Umi Kalsum, dihukum 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Gubernur Gatot memenuhi panggilan KPK untuk kali kedua, Senin. Ia datang bersama istrinya, Evi Susanti, pukul 09.34 WIB. Mengenakan batik lengan panjang batik berwarna hijau semestara sang istri mengenakan baju hijau tua, dengan rok dan kerudung hitam.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, pasangan suami istri tersebut akan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka anak buah OC Kaligis, M Yagari Bhastara alias Gerry.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus suap yang dilakukan oleh seorang pengacara yang tengah menjadi kuasa hukum oknum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sejak kasus itu bergulir, KPK telah menetapkan enam orang tersangka, tiga orang hakim PTUN Medan, seorang panitera, dan dua pengacara.

Pengacara Gatot dan Evy, Razman Arief Nasution, menegaskan kedua klienya tak terlibat kasus suap hakim PTUN Medan. "Saya sam-paiakan, Ibu Evy dan Pak Gatot sudah menyatakan ke-siapannya untuk hadir dan diperiksa hari ini. Beliau datang berdua dan menyampaikan kepada saya, insya Allah mereka tidak terkait dengan suap-menyuap di PTUN," ujar Razman kepada wartawan di Gedung KPK. (tribunnews.com/tic)